

Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Iwen Wensetiawen¹ Nur Laila Meilani² Dadang Mashur³

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2,3}

Email: iwenwensetiawen@gmail.com¹

Abstrak

Permasalahan *stunting* saat ini sedang menjadi isu nasional maupun internasional yang sedang dihadapi termasuk di Indonesia, yang mana saat ini sedang menghadapi masalah gizi yang cukup berat ditandai dengan banyaknya status balita pendek (*stunting*). Pemerintah menetapkan untuk prevalensi *stunting* pada Tahun 2024 harus di bawah 14%. Salah satunya di Kabupaten Kuantan Singingi prevalensi *stunting* masih berada di atas angka 14% tepatnya di Kecamatan Cerenti yang merupakan Kecamatan dengan angka prevalensi tertinggi di Kabupaten Kuantan Singingi pada Tahun 2022 dengan prevalensi *stunting* 18,53%. Bagaimana implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya dengan menggunakan teori George Edward III yang di lihat pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil Penelitian ini menunjukkan belum tercapainya komunikasi antar badan pelaksana yang sudah berjalan baik namun komunikasi dengan masyarakat terkait belum optimal. Keterbatasan dan kekurangan pada sumber daya manusia dengan jumlah keahlian terkait sub bidang khusus, sumber daya dana atau anggaran yang masih terbatas atau masih kurang dan sarana prasarana yang belum cukup memadai untuk melayani masyarakat dalam percepatan penurunan *stunting*. Sikap pegawai yang sudah baik dan disiplin namun tidak adanya insentif yang memberi semangat kerja pada pegawai dan struktur birokrasi dengan peran pemerintah daerah yang dapat mempercepat dan memperlancar proses pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Adanya faktor penghambat dalam hal kurangnya pelatihan dan pengembangan untuk petugas pelaksana, pengetahuan orangtua dan masyarakat terhadap gizi dan *stunting* dan kurang jelasnya informasi yang diterima masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Percepatan Penurunan *Stunting*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak yang berusia di bawah lima tahun (balita) yang di akibatkan karena kurangnya gizi kronis dan infeksi yang berulang terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dari janin hingga anak berusia 24 bulan. Salah satu dari banyaknya persoalan kesehatan gizi pada anak yang menjadi isu nasional maupun internasional yang sedang dihadapi saat ini ialah *stunting*. Permasalahan gizi ialah permasalahan dalam siklus kehidupan yang sangat penting yang harus segera ditangani karena hal ini dapat terjadi ketika bayi masih berada di dalam kandungan ibunya, balita, remaja hingga lanjut usia. Masalah gizi tidak melihat pada golongan umur, hal ini dapat terjadi pada semua golongan usia. Permasalahan gizi pada satu kelompok usia tertentu akan berpengaruh terus menerus pada siklus kehidupan selanjutnya. Indonesia mempunyai masalah gizi yang cukup berat salah satunya yang ditandai dengan banyaknya status gizi buruk pada anak balita pendek (*stunting*). Seorang anak tergolong *stunting* apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi tinggi anak yang seumuran. *Stunting* dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK)

tidak hanya beresiko menghambat pertumbuhan tinggi seorang anak tetapi juga beresiko mengakibatkan terhambatnya perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas seorang anak di masa depan.

Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang krusial, khususnya di negara-negara berkembang. *Stunting* merupakan bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada balita akibat dari akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari masa kehamilan sampai usia 24 bulan. Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, meningkatnya kesakitan, menghambat perkembangan mental anak dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Balita yang mengalami *stunting* memiliki resiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan resiko mengalami penyakit degeneratif di masa yang akan datang. Menurut *World Health Organization* (WHO) standar pertumbuhan anak didasarkan pada indeks panjang badan dibanding umur (PB/U) atau tinggi badan dibanding umur (TB/U) dengan batas (*z-score*) kurang dari -2 SD. *Stunting* atau balita pendek bisa diketahui bila seorang balita sudah diukur panjang atau tinggi badannya lalu dibandingkan dengan standar, dan hasil dari pengukurannya ini berada pada kisaran normal (Kemenkes RI, 2018).

Stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan dengan tinggi di bawah minus (*stunting* berat dan sedang) dan minus tiga (*stunting* kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO. *Stunting* merupakan permasalahan yang semakin banyak ditemukan di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh UNICEF terdapat 7,8 juta anak yang menderita mengalami *stunting*, dan Indonesia masuk ke dalam 5 besar dengan angka *stunting* tinggi (UNICEF 2007). Menurut data dari *World Health Organization* (WHO) diperkirakan ada sekitar 54% kematian para balita yang disebabkan oleh keadaan gizi kurang baik, sehingga dunia masih memprioritaskan masalah gizi, kemiskinan dan kelaparan dalam kerangka pembangunan dunia yang dituang ke dalam tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan lanjutan dari konsep *Millentum Development Goals* (MDGs). Kesehatan masyarakat merupakan tumpuan utama dalam menjalankan program penurunan *stunting* yang terjadi di masyarakat. Sebagai upaya dalam menangani, menetralisasi semua masalah dan penyimpangan mengenai kesehatan yang ada di masyarakat. Masyarakat sering menganggap tumbuh pendek sebagai faktor keturunan persepsi yang salah di masyarakat membuat masalah ini tidak mudah diturunkan dan membutuhkan upaya besar dari pemerintah dan berbagai sektor terkait lainnya. Hasil studi membuktikan bahwa pengaruh faktor keturunan hanya berkontribusi sebesar 15%, sementara unsur terbesar adalah terkait masalah asupan gizi, hormon pertumbuhan dan penyakit infeksi berulang.

Dinas kesehatan adalah unsur pelaksanaan pemerintah dalam bidang kesehatan yang di pimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas kesehatan memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian urusan daerah dalam bidang kesehatan untuk menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan dan melakukan tugas pembantuan sesuai dengan bidangnya. Puskesmas merupakan unit pelayanan masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan yang berada di desa-desa setempat di bawah supervisi dinas kesehatan. Puskesmas berperan penting dalam upaya penyediaan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi masyarakat. Mereka biasanya menawarkan pelayanan kesehatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Beberapa layanan kesehatan yang biasanya disediakan oleh puskesmas yaitu berupa: pemeriksaan kesehatan rutin, pelayanan imunisasi, konsultasi dan pengobatan umum, pengobatan dan

perawatan dan kondisi-kondisi medis umum, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pelayanan gizi (termasuk pemantauan pertumbuhan anak), pelayanan kesehatan lingkungan dan penyuluhan kesehatan. Dalam pelayanan gizi perlu adanya perbaikan gizi, dimana perbaikan gizi merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh agar dapat berfungsi dengan baik dan optimal. Dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi “bahwa meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan komitmen global dan merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia, bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus-menerus.” Selain tingkat *stunting* yang masih dibawah standar, pemahaman masyarakat tentang *stunting* pun masih terbilang minim. Salah satunya ialah *stunting* yang kerap diartikan sebagai gizi buruk ditengah masyarakat awam. *Stunting* menjadi topik yang menarik perhatian sebab kebanyakan orang beranggapan bahwa *stunting* adalah gizi buruk padahal keduanya adalah hal yang berbeda.

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 merupakan salah satu strategi *dalam Scaling Up Nutrition* (SUN) dengan melibatkan berbagai sektor yang harus disikapi dengan koordinasi yang kuat mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Diseminasi informasi dan advokasi kepada stakeholder dan pemangku kepentingan lain diberbagai lintas sektor pada tingkatan yang sama dan perlu dilakukan upaya pelatihan dan edukasi untuk jajaran struktural agar mampu menjelaskan dan melakukan pemberdayaan dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Selanjutnya intervensi penting penguatan 1000 HPK yang menjadi bagian dari budaya di kehidupan sosial masyarakat, melakukan kursus singkat dalam pengetahuan dan pendidikan kepada ibu sebelum kehamilan atau sebelum menjadi pengantin (calon pengantin) sebagai bekal ibu dalam kehamilan untuk menjaga tumbuh kembang kognitif janin yang dimulai dari trimester pertama dalam pembentukannya (Aryastami,2017). Dalam rangka percepatan penurunan *stunting* ditetapkan strategi nasional percepatan penurunan *stunting*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2017 tentang sebuah kebijakan strategis gizi dan pangan yang menegaskan tentang penyusunan suatu Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkualitas dalam membangun pangan dan gizi. Selanjutnya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMES) yang mampu meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi.

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021 angka prevalensi *stunting* di Inonesia menurun dari angka 30,8% pada tahun 2018 menurun ke angka 24,4%. Namun meskipun mengalami penurunan, persentase prevalensi *stunting* di Indonesia masih terbilang cukup tinggi karena berdasarkan standar WHO persentase prevalensi *stunting* harus berada di bawah 20% dan pemerintah menargetkan prevalensi *stunting* di tahun 2024 turun menjadi 14%. Pemerintah Provinsi Riau memfokuskan penurunan *stunting* dengan mendata secara keseluruhan kota maupun Kabupaten yang ada di Provinsi Riau untuk mengetahui dengan jelas lokus *stunting* yang ada di Provinsi Riau.

Penurunan *stunting* menitikberatkan kepada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan terutama akses terhadap makanan bergizi, lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak, akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan, serta kesehatan lingkungan yang berawal dari air bersih, ke empat faktor tersebut mempengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan

stunting pemerintah membuat kebijakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 menegaskan tentang percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan. Strategi nasional dalam percepatan penurunan *stunting* terdapat langkah-langkah yang berupa 5 pilar yang berisikan kegiatan untuk percepatan penurunan *stunting*, dimana pilar tersebut meliputi: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintahan Desa. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintahan Daerah provinsi, Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintahan Desa. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal ini menjadi suatu objek penelitian guna memperoleh informasi yang akurat mengenai kasus *stunting* yang terjadi dengan judul "Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi". Berdasarkan penjelasan masalah yang telah dipaparkan di latar belakang, Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi? Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Percepatan Penurunan *stunting* di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi? Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *stunting* di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mengidentifikasi apa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan percepatan Penurunan *stunting* di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Fenomenologi menjelaskan sifat fenomena, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai sesuatu yang apa adanya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Fenomenologi juga diartikan sebagai pandangan berfikir yang menegaskan pada fokus pengalaman-pengalaman dan cerita subjektif manusia dan interpretasi atas pelaksanaan di dunia (Moleong, 2007: 14). Sementara Creswell (dalam Raco, 2013) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah satu pendekatan guna menemukan dan memahami satu gejala sentral. Oleh karena itu dalam penelitian dengan metode kualitatif ini peneliti mewawancarai informan yang universal dan agak luas. Informasi tersebut biasanya berbentuk kata atau teks melalui pernyataan yang kemudian akan dianalisis. Hasil dari analisa itu bisa berbentuk fenomenologi permasalahan dalam penelitian. Sehingga data itu peneliti membuat interpretasi untuk menyimpulkan hasil yang didapatkan. Setelahnya peneliti memaparkan dengan penelitian-penelitian yang diteliti sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dijabarkan dalam bentuk laporan tertulis. Dari pendapat diatas bisa ditarik bahwa penelitian fenomenologi dengan pendekatan kualitatif mempunyai tujuan untuk mengeksplorasi serta mengklarifikasi tentang suatu fenomena-fenomena yang ada dengan didasari dari pengalaman subjektif atau fenomenologikal yang sedang di alami oleh individu yang berkaitan terhadap masalah yang diteliti untuk mendapatkan gambaran mengenai proses implementasi suatu kebijakan. Sehingga dengan pendekatan ini, peneliti

berharap bisa menjelaskan serta menganalisis dengan rinci tentang implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Kecamatan Cerenti. Penulis melakukan penelitian pada lokasi tersebut karena Kabupaten Kuantan Singingi termasuk pada pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan sesuai dengan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Kemudian alasan penulis memilih Kecamatan Cerenti karena Kecamatan Cerenti merupakan Kecamatan dengan angka *stunting* paling tinggi di Kabupaten Kuantan Singingi.

Informan penelitian adalah seseorang yang mempunyai kemampuan mengetahui atau menguasai informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi; Kepala Sub Bidang Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi; Pegawai Sub Bidang Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi; Kepala BLUD UPTD Puskesmas Kecamatan Cerenti; Penanggungjawab gizi BLUD UPTD Puskesmas Kecamatan Cerenti; Kader Posyandu Kecamatan Cerenti; Salah satu orangtua dari balita *stunting* Kecamatan Cerenti; Salah satu Ibu hamil Kecamatan Cerenti.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer. Sugiyono (2018:456) mendefinisikan data primer sebagai sumber data yang menyalurkan informasi secara langsung kepada peneliti. Sumber informasi pertama, atau lokasi dimana penelitian dilakukan, dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sendiri. Data ini bisa berbentuk hasil wawancara langsung bersama informan.
2. Data Sekunder. Data sekunder sebagaimana didefinisikan oleh Sugiyono (2018:456), adalah sumber informasi yang secara tidak langsung menyampaikan informasi kepada peneliti, seperti melalui individu atau dokumen lain. Data sekunder yaitu data yang sifatnya mendukung dari keperluan dari data primer seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara. Teknik wawancara dalam sebuah penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi secara mendalam tentang obyek yang diteliti. Teknik wawancara yang dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur. Hal ini bertujuan agar informasi yang didapatkan mempunyai kapasitas yang cukup untuk sejumlah aspek dalam penelitian. Hasil dari wawancara digunakan sebagai data utama mengenai implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Observasi. Peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan data kongkrit di lokasi penelitian terkait obyek penelitian. Observasi dilaksanakan agar memperoleh informasi yang lebih komprehensif tentang proses kerja yang dilakukan oleh Puskesmas dalam percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan studi dokumentasi untuk memperoleh data dan informasi dengan cara menelaah berbagai macam buku, dokumen, dan peraturan-peraturan yang terkait mengenai percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil informasi dan analisis dari studi dokumentasi digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Implementasi merupakan salah satu tahapan yang penting dalam sebuah siklus kebijakan. Suatu kebijakan yang sudah dirumuskan tidak akan ada artinya jika tidak diimplementasikan. Implementasi adalah tahap pelaksanaan sebuah kebijakan yang sudah dirumuskan dan telah diputuskan oleh para implementator kebijakan agar mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. *Stunting* merupakan salah satu permasalahan gizi buruk yang sedang dihadapi saat ini baik nasional maupun isu internasional termasuk Indonesia. Permasalahan gizi buruk sangat mempengaruhi kesehatan seorang anak dan tentunya hal ini berkaitan erat dengan sumber daya manusia di masa yang akan mendatang sebab masalah gizi buruk dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu masalah ini sangat perlu untuk segera di tangani. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana yang disebutkan pada pasal 10 ayat 2 dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa ikut serta dalam melaksanakan kegiatan percepatan penurunan *stunting* sehingga Bupati Kabupaten Kuantan Singingi menurunkan peraturan tersebut Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72 Tahun 2022 tentang Tim percepatan penurunan *stunting*. Oleh karena itu untuk menindaklanjuti ketentuan yang sudah di atur dalam peraturan presiden dan peraturan bupati Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan salah satunya dalam percepatan penurunan *stunting* kepada masyarakat Kecamatan Cerenti yang merupakan Kecamatan dengan angka prevalensi tertinggi di Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melibatkan 2 organisasi ataupun instansi satuan perangkat daerah, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi dan Puskesmas Kecamatan Cerenti yang bekerja sama juga dengan posyandu yang bertugas untuk melakukan proses pelayanan dan pemantauan pertumbuhan pada anak bayi dan balita. Berdasarkan dari permasalahan yang penulis temukan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi fenomena dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dikemukakan variabel-variabel yang saling berkaitan dan dapat mempengaruhi dalam proses implementasi dan kinerja dari sebuah kebijakan. Variabel tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dengan tujuan agar tercapai dan terpenuhinya kebutuhan dalam pelayanan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Cerenti sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Komunikasi

Komunikasi berkaitan erat hubungannya dengan bagaimana sebuah implementasi kebijakan dikomunikasikan di dalam sebuah organisasi atau kepada publik, ketersediaan sumber daya untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan, sikap dari para implementator kebijakan terkait dan bagaimana struktur birokrasi dari implementasi kebijakan. Komunikasi merupakan proses penyampaian dari informasi, ide-ide yang dikemukakan oleh para anggota terkait secara timbal balik dengan maksud agar dapat mencapai tujuan dari organisasi kebijakan yang telah ditetapkan. Komunikasi dan informasi menjadi faktor penting dalam sebuah organisasi dan merupakan faktor-faktor penting dalam mempengaruhi suatu implementasi kebijakan sebab komunikasi dan informasi pada sebuah implementasi kebijakan memiliki fungsi agar dapat mempermudah dan meningkatkan koordinasi antar implementator dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Untuk mewujudkan sebuah pola

komunikasi yang baik dan benar tentunya perlu dibangun dan dikembangkan lagi saluran-saluran komunikasi yang lebih efektif. Semakin baik perkembangan saluran-saluran komunikasi maka akan semakin baik dan berkembang pula cara penyampaian informasi dan komunikasinya. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup 3 dimensi yang penting yaitu, transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi yang pertama yaitu transformasi, ini bertujuan agar informasi bisa tersampaikan secara tepat kepada pelaksana kebijakan dan juga kepada kelompok sasaran dan pihak-pihak terkait. Selanjutnya dimensi kejelasan, ini bertujuan agar informasi yang disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami serta menghindari terjadinya kesalahpahaman penafsiran dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran dan semua pihak terkait dalam proses implementasi kebijakan. Dan yang terakhir yaitu dimensi konsistensi, ini bertujuan agar informasi yang disampaikan dapat konsisten sehingga tidak adanya kebingungan antar badan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran dan pihak-pihak yang terkait. Komunikasi ini dapat dilakukan dan dilaksanakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Sama halnya dengan implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Pola komunikasi yang terjadi adalah komunikasi secara langsung dan secara tidak langsung. Komunikasi secara langsung adalah komunikasi yang dilakukan oleh para implementator kebijakan, dalam hal ini aktor yang terlibat adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi melakukan perencanaan dan pengawasan terhadap percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan bersama BLUD UPTD Puskesmas Kecamatan Cerenti bersama Posyandu yang dilakukan dalam bentuk rapat.

Masih belum optimalnya komunikasi yang dilakukan antar aktor pelaksana kebijakan ataupun petugas dengan para masyarakat terkait, sehingga ini menimbulkan kurangnya pelayanan terhadap percepatan penurunan *stunting*. Hal ini juga terjadi karena kurang akrabnya petugas kesehatan dalam melakukan pemantauan dan pemeriksaan pertumbuhan, kurangnya komunikasi dan keakraban tersebut membuat masyarakat salah paham akan kesehatan yang ingin dilakukan oleh para petugas. Puskesmas dan posyandu Kecamatan Cerenti belum mampu memenuhi syarat pelayanan yang mana di atur pada Peraturan Presiden Nomor 72 ayat 2(e) Tahun 2021, yang mana dikatakan bahwa dalam rangka percepatan penurunan *stunting* para aktor pelaksana harus menetapkan strategi nasional percepatan penurunan *stunting* yang bertujuan agar dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat terkait. Pola komunikasi yang terjadi antar badan pelaksana ataupun petugas dengan masyarakat terkait ialah melalui komunikasi secara langsung yang berupa diadakannya rapat-rapat dan komunikasi tidak langsung yaitu melalui telepon dan Whatsapp grup khusus *stunting*.

Sumber Daya

Sumber daya adalah salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya dalam sebuah proses implementasi kebijakan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksudkan ialah ketersediaan sumber daya manusia yaitu pegawai atau staf bagian terkait, sumber daya dana dan sumber daya ketersediaan sarana dan prasarana. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan keberhasilan dari implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu diantaranya:

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia ialah berkaitan dengan ada dan tersedianya pegawai atau staf pelaksana yang melihat apakah sudah mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Ketersediaan pegawai yang cukup akan menentukan

dan menjadi faktor penentu utama dalam pelaksanaan implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting*. Hal sebaliknya ketersediaan sumber daya manusia yang kurang dan sumber daya manusia yang tidak sesuai bidang akan menjadi faktor kegagalan dan keterlambatan dalam kebijakan ini, karena sumber daya manusia ialah orang yang akan menjalankan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*. Oleh karena itu untuk menjamin keberhasilan dalam sebuah implementasi kebijakan ini pegawai dan petugas dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* harus mempunyai keterampilan yang sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing dalam menjalankan tugas, sebab sumber daya manusia sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan atau gagalnya sebuah proses dalam implementasi kebijakan.

Pada wawancara bersama dengan Kepala Dinas Kabupaten Kuantan Singingi dan Kepala Puskesmas Kecamatan Cerenti penulis dapat menganalisa bahwa salah satu hal yang menjadi penghambat dalam percepatan penurunan *stunting* ini ialah masih sangat minim dan kurangnya sumber daya manusianya karena kekurangan ini untuk petugas percepatan penurunan *stunting* di bantu oleh pegawai yang bukan terkait dengan bidang *stunting*, dan sumber daya manusia dalam percepatan penurunan *stunting* ini tidak pernah mengikuti pelatihan dan pengembangan khusus terkait *stunting* sehingga hal ini menyebabkan mengapa *stunting* masih sangat tinggi terutama di Kecamatan Cerenti, padahal pelatihan dan pengembangan ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan pengembangan serta dapat meningkatkan wawasan dalam bidang pekerjaan pegawai, seperti pada bidang administrasi, informasi dan pelayanan. Selain itu pelatihan dan pengembangan juga sangat penting untuk ibu pkk ataupun ibu kader posyandu agar bisa lebih memahami tentang pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*. Namun selama ini para pegawai dan petugas hanya terfokus pada tugas pekerjaannya yang konstan dan ini terus terjadi dari dahulunya sehingga kondisi ini menimbulkan dampak pada SOP yang tetap seperti itu tidak ada kemajuan dan perubahan dalam instansi.

Sumber Daya Dana

Dalam sebuah implementasi kebijakan, sumber daya dana berhubungan dengan kecukupan dana atau modal dalam pelaksanaan sebuah kebijakan untuk kelancaran implementasi kebijakan. Sumber daya dana juga merupakan hal terpenting dalam menjalankan sebuah kebijakan karena kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien dan tidak akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan direncanakan jika dukungan sumber dana ataupun anggarannya tidak mencukupi. Dalam proses percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Cerenti ini terdapat kendala yang membuat terhambatnya pelaksanaan implementasi kebijakan karena kekurangan dana atau anggaran yang masih terbatas tersebut membuat keluhan dari ibu-ibu kader posyandu yang harus memberikan PMT kepada anak bayi dan balita serta ibu hamil kek dan kekurangan dana ini juga menghambat dalam 7 kegiatan yang dilakukan dalam percepatan penurunan *stunting* serta dana sekarang belum mampu memenuhi untuk setiap kebutuhan berupa sarana prasarana yang juga masih terbatas.

Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan juga memberikan pengaruh terhadap keberhasilan dari sebuah proses implementasi kebijakan. Jika sarana dan prasarana yang digunakan dalam sebuah kebijakan kurang memadai maka kebijakan tersebut akan berjalan kurang baik, sehingga ini tentunya menjadi faktor penghambat dalam mencapai tujuan dari kebijakan. Pada sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan

stunting sudah diadakan dan disediakan, namun para petugas mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang ada masih belum cukup atau masih adanya kekurangan.

Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana sangat memberikan pengaruh dalam sebuah proses implementasi kebijakan. Jika sikap implementator atau aktor pelaksana dalam sebuah implementasi kebijakan memiliki sikap yang baik dalam menjalankan tugas dan patuh pada arahan serta isi dari kebijakan maka implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik, demikian pula sebaliknya jika sikap para implementator dalam menjalankan tugas kurang baik maka implementasi kebijakan akan terganggu dan terhambat serta akan mengalami keterlambatan keberhasilan. Sikap dan perilaku aktor kebijakan menunjukkan kepatuhan pada perintah dan arahan dalam melakukan tugasnya akan memberikan rasa tanggungjawab dan sikap disiplin dari pegawai kesehatan dalam menjalankan tugasnya.

Struktur Birokrasi

Pada sebuah proses implementasi kebijakan tentunya struktur atau karakteristik dari badan pelaksana menjadi bagian terpenting dan merupakan faktor pendukung atas keberhasilan dari sebuah kebijakan. Badan pelaksana pada implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* ialah Dinas Kesehatan bersama UPTD BLUD Puskesmas Kecamatan Cerenti beserta Posyandu. Dinas Kesehatan bersama dengan BLUD UPTD Puskesmas bersama posyandu merupakan bentuk dari unit pelaksanaan yang dibentuk untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan dan pemantauan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi khususnya pada Kecamatan Cerenti. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala BLUD UPTD Puskesmas Kecamatan Cerenti untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Kecamatan Cerenti dan juga Posyandu dalam percepatan penurunan *stunting*. Dinas Kesehatan maupun BLUD UPTD Puskesmas dalam penanganan *stunting* tidak membuat SOP khusus, hal ini dikarenakan cangkupannya terlalu luas, ada beberapa OPD yang berkaitan dalam penanganan percepatan penurunan *stunting*. Sebagaimana dari unit pelaksana dari aktor implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang dijelaskan pada pasal 3 dalam melaksanakan tugasnya, tim percepatan penurunan *stunting* bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah memiliki wewenang dan kekuasaan menetapkan kebijakan dan bertanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting*.

Dalam penjelasan tersebut, dapat digambarkan pola-pola hubungan birokrasi antar badan pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Cerenti yaitu BLUD UPTD Puskesmas bersama posyandu Kecamatan Cerenti yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terkait dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi yang bertugas dalam melakukan perencanaan dan pemantauan dari percepatan penurunan *stunting*. Karakteristik dari badan pelaksana ini memberikan pengaruh atas keberhasilan ataupun kegagalan dalam sebuah proses implementasi kebijakan. Karakteristik dari badan pelaksana juga mencakup struktur birokrasi dan pola hubungan yang terjadi di dalamnya yang berpengaruh penting terhadap keberhasilan kebijakan. Sama halnya dengan implementasi kebijakan percepatan penurunan

stunting di Kecamatan Cerenti peran dari Pemerintah Daerah masih sangat dibutuhkan dalam menentukan kebijakan, meskipun sudah dibentuk tim percepatan penurunan *stunting* sebagai badan pelaksana dari percepatan penurunan *stunting*. Fragmentasi atau tanggungjawab dari badan pelaksana sudah dijalankan dengan optimal. Para petugas atau pegawai dari implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* ini selalu memberikan penyuluhan dan edukasi kepada ibu hamil, ibu menyusui dan ibu balita *stunting* terkait pentingnya gizi yang baik, pola makan yang seimbang dan cara merawat anak yang sehat. Selain itu para pegawai juga melakukan pemantauan pada tumbuh kembang anak secara rutin setiap bulannya termasuk pada penilaian gizi anak. Pemberian imunisasi pada anak juga dilakukan sesuai dengan jadwalnya untuk mencegah penyakit yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak serta pemberian suplemen gizi Vitamin A Biru untuk bayi yang berusia 6-11 bulan, Vitamin A Merah untuk balita 12-59 bulan dan Tablet Fe untuk ibu hamil dan remaja putri. Dinas Kesehatan maupun BLUD UPTD Puskesmas juga melakukan koordinasi dengan OPD lain untuk memberikan koordinasi terkait percepatan penurunan *stunting* dan juga langkah-langkah lain yang diperlukan untuk penanganan *stunting*.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan BLUD UPTD Puskesmas Kecamatan Cerenti beserta Posyandu belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dilihat dan diketahui karena dari Tahun 2021 hingga saat ini Kecamatan Cerenti masih menjadi lokus dengan angka prevalensi *stunting* tertinggi di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dapat penulis temukan beberapa kendala dan faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi kendala ataupun faktor penghambat dalam percepatan penurunan *stunting*:

Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan untuk Petugas Pelaksana

Kurangnya pelatihan dan pengembangan untuk petugas pelaksana merupakan salah satu penghambat dalam sebuah proses implementasi kebijakan karena hal ini dapat menjadi penghambat jika pemahaman petugas tidak mencukupi dalam proses implementasi kebijakan. Penambahan jumlah pegawai atau penempatan pegawai lain harus didasari dengan pengetahuan yang dimiliki agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting*. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dengan baik atau tidak sesuai dengan sub bidangnya maka akan menghambat implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* tentu diperlukan seorang petugas yang memahami tentang kesehatan berupa gizi baik pada pertumbuhan dan perkembangan seorang anak juga pada pemberian asupan gizi anak. Namun dalam percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Cerenti hanya mempunyai satu pegawai saja dalam bidang terkait. Harus diadakan dan dilakukan pelatihan untuk pengembangan kemampuan terkait dalam percepatan penurunan *stunting* ini baik untuk pegawai gizi maupun untuk pegawai dari sub bidang lain yang ditempatkan untuk membantu percepatan penurunan *stunting* agar kinerja dari pegawai dapat berjalan dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi. Namun Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi belum ada memberikan dan melakukan kegiatan pelatihan untuk

pengembangan kemampuan kepada para pegawai sehingga para pegawai belum kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Pengetahuan dan Kepercayaan Orangtua serta Masyarakat Terhadap Gizi dan *Stunting*

Pengetahuan orangtua dan masyarakat yang menganggap bahwa *stunting* ini bukanlah gizi buruk melainkan hanya faktor genetik dari orangtua menjadi penghambat dalam percepatan penurunan *stunting* karena menyebabkan masyarakat tidak terlalu mengikuti kegiatan dan sosialisasi tentang asupan gizi yang baik. Beberapa masyarakat sedikit banyaknya masih beranggapan bahwa kondisi tumbuh pendek disebabkan karena hasil dari keturunan orangtua yang pendek. Padahal, seorang anak yang tumbuh pendek bisa terindikasi bukan karena genetik orangtua tetapi juga menandakan bahwa seorang anak sedang mengalami gizi yang buruk. Kurangnya pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap *stunting* ini menjadi penghambat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting*, karena saat diadakan sosialisasi hanya sedikit dari masyarakat terkait yang datang menghadiri baik dari ibu balita *stunting* maupun ibu hamil. Kurangnya pengetahuan orangtua terhadap *stunting* ini juga berpengaruh pada pola makan seorang anak karena kurangnya pengetahuan dan pengertian terhadap nutrisi anak yang dapat menyebabkan tidak seimbang dan kurangnya asupan penuh gizi pada anak. Masyarakat Kecamatan Cerenti masih memegang kepercayaan setempat yang mana jika terlalu banyak mengkonsumsi ikan dapat menyebabkan cacangan. Dalam percepatan penurunan *stunting* ini faktor penghambat lainnya juga ditamui pada pola makan anak yang mana pemahaman dan kepercayaan masyarakat yang masih dipercayai sampai saat ini. Pemahaman masyarakat yang beranggapan bahwa tumbuh pendek bukanlah *stunting* melainkan adalah faktor keturunan yang membuat mereka tidak mau melakukan pemeriksaan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Selain itu kepercayaan yang masih dipegang dan dipercayai masyarakat khususnya pada Kecamatan Cerenti sampai saat ini adalah tidak boleh mengkonsumsi ikan dan telur terlalu banyak. Masyarakat Kecamatan Cerenti mempercayai bahwa makan ikan terlalu banyak dapat menyebabkan anak cacangan dan makan telur terlalu banyak dapat menyebabkan anak bisulan. Padahal menurut dari penanggungjawab gizi mengatakan bahwa ikan dan telur merupakan protein yang baik untuk pertumbuhan gizi anak, namun masyarakat masih beranggapan pada kepercayaan setempat. Faktor lainnya orangtua juga tidak terlalu memperhatikan makanan yang di konsumsi oleh anak. Seperti banyaknya anak-anak yang mengkonsumsi makanan ringan yang tidak seimbang atau sudah berlebihan yang dapat berdampak negatif pada gizi anak.

Kurang Jelasnya Informasi yang diterima Masyarakat

Faktor penghambat lainnya adalah kurang jelasnya informasi yang diterima oleh masyarakat dalam percepatan penurunan *stunting*. Baik buruknya komunikasi akan berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang terjalin secara kekeluargaan, komunikasi yang sopan dan santun dan komunikasi yang bisa membuat masyarakat merasa akrab dengan para petugas kebijakan. Namun salah satu penyebab terjadinya kendala dalam percepatan penurunan *stunting* ini adalah masih kurang baiknya komunikasi yang terjalin antara petugas dengan masyarakat terkait. Cara komunikasi yang diberikan pegawai dengan masyarakat belum optimal, para petugas yang datang tanpa memberitahu dulu kepada masyarakat membuat masyarakat takut akan penyuluhan yang petugas lakukan. Para pegawai/petugas dalam memberikan pemahaman terkait *stunting* mereka juga menggurui masyarakat sehingga masyarakat tidak tertarik dan tidak peduli dengan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas. Selain itu

informasi maupun sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pelaksana juga masih kurang dimengerti. Sosialisasi yang dilakukan pada kelompok masyarakat terkait belum bisa dikatakan jelas, sebab para ibu-ibu tidak terlalu mengerti dengan apa yang disampaikan oleh ibu kader dan ibu kader yang juga tidak terlalu memahami isi dari sosialisasi tersebut.

KESIMPULAN

Analisis dan deskripsi dari fenomena terhadap fokus dalam penelitian Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yaitu menjelaskan komunikasi yang terjadi antar badan pelaksana, sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya dana dan sumber daya sarana dan prasarana. Disposisi atau sikap dari pelaksana dalam kepatuhan menjalankan implementasi kebijakan dan yang terakhir struktur birokrasi yaitu karakteristik dari badan pelaksana yang mencakupi kewenangan dan pola birokrasi dari badan pelaksana yang disesuaikan dengan SOP yang berlaku. Maka dalam bab ini ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut: Implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan melalui indikator keberhasilan dengan menggunakan teori dari G.Edward III sudah dilakukan akan tetapi masih belum optimal karena dari empat indikator keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa belum ada yang memberikan pengaruh dominan terhadap implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Komunikasi, pada indikator komunikasi dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa belum optimalnya komunikasi eksternal antara petugas pelaksana dengan masyarakat terkait yang disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang dilakukan oleh para petugas kepada masyarakat terkait sebelum turun ke lapangan. Sumber daya, pada indikator sumber daya dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa masih belum optimal, baik sumber daya manusia, sumber daya dana dan sumber daya sarana dan prasarana. Pada sumber daya manusia diketahui bahwa masih sangat kekurangan untuk pegawai dengan kemampuan dan keahlian terkait. Kemudian untuk sumber dana juga masih mengalami keterbatasan karena tidak adanya dana khusus untuk *stunting* dan sudah ditutupnya untuk DAK Nonfisik sehingga keterbatasan dana ini juga menyebabkan keterbatasan pada sarana dan prasarana. Disposisi, sikap pelaksana yang sudah memiliki tanggungjawab serta disiplin terhadap tugasnya, namun belum ada pemberian insentif sehingga mempengaruhi resposntifitas pegawai. Struktur Birokrasi, pada struktur birokrasi diketahui bahwa belum ada ditetapkan SOP dalam penanganan percepatan penurunan *stunting*, pola birokrasi antar badan pelaksana juga belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam penelitian implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* ditemukan beberapa kendala dan faktor penghambat yakni kurangnya pelatihan dan pengembangan untuk petugas pelaksana, pengetahuan orangtua dan masyarakat terhadap gizi dan *stunting* dan kurang jelasnya informasi yang diterima masyarakat. Namun tidak hanya faktor penghambat, dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* juga terdapat dan ditemukan faktor pendukung yakni sikap dari pegawai yang patuh dan konsen dalam menjalankan tugas untuk percepatan penurunan *stunting* dan juga tanggungjawab dari badan pelaksana dalam percepatan penurunan *stunting* mereka sudah melakukan penyuluhan kepada ibu hamil, ibu menyusui dan ibu dari balita *stunting* dalam pemberian asupan gizi yang baik.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan permasalahan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, disarankan beberapa hal yaitu sebagai berikut: Disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi untuk memberikan pelatihan membangun komunikasi efektif kepada masyarakat, sehingga para pegawai-pegawai terkait yang belum

mempunyai skil dapat memahami bagaimana membangun komunikasi yang efektif dan hal ini tentunya akan memberikan pengaruh komunikasi yang positif kepada masyarakat, orangtua dan ibu hamil yang tidak mau datang sosialisasi terkait *stunting*. Disarankan kepada Dinas Kesehatan khususnya untuk Kecamatan Cerenti untuk menambah pegawai atau petugas khususnya di bidang terkait *stunting* dan melakukan pelatihan untuk pengembangan kemampuan baik untuk pegawai sub bidang gizi maupun pegawai dari sub bidang lain yang membantu dalam percepatan penurunan *stunting*. Kemudian untuk sumber dana diharapkan kepada pemerintah untuk mengaktifkan kembali DAK Nonfisik atau dana khusus untuk *stunting* agar dana untuk percepatan penurunan *stunting* bisa mencukupi dan sarana prasaranya juga akan mencukupi. Disarankan dan diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat memberikan insentif lebih selain gaji pokok kepada para pegawai atau petugas pelaksana implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting*. Hal ini bertujuan agar para pegawai atau petugas dapat lebih semangat dan termotivasi dalam menjalankan tugas pelaksanaan implementasi kebijakan percepatan penurunan *stunting*.

DAFTAR PUSTAKA

- ACC/SCN. 2000. *The World Nutrition Situation Throughout the life Cycle*. Geneva: WHO
- Agustino, L. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy*
- Agustino, L. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Anggraini, D, dkk. 2022. Implementasi Program Pencegahan Stunting di Puskesmas Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*
- Aryastami, N. K. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi *Stunting* di Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 45(4), 233–240.
- Ayuningtyas, D. (2014). *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers
- Beal, T. et al. 2018. A Review Of Child *Stunting* Determinants In Indonesia.
- Buku Ringkasan Stunting 100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (*Stunting*). Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2017
- Dafriadi. 2021. *Implementasi Program Penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone*
- Edward III, George C (edited). 1990. *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London Eglan.
- Goggin, Malcom L et al. Grindle, M.S 1980. *Politics And Policy Implementation In The Third World*. New Jersey: Prinsetown University Press
- Hajijah, P, S. 2019. *Analisis Implementasi Penurunan Stunting di Desa Secanggung Kabupaten Langkat*. Skripsi. Universitas Negeri Sumatera Utara
- Handoyo, E, 2012. *Kebijakan Publik*. Kebijakan Publik Deliberatif.
- Herdiansyah, H. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika
- J.R, Raco. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo
- Kadji, Yulianto. 2018. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Universitas Negeri Gorontalo Press. Gorontalo.
- Keban, Yeremias, T.2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Penerbit Gaya Media Yogyakarta.
- Kemenkes RI (2018a). *Buletin Stunting, Kementerian Kesehatan RI*
- Kinanti, A, dkk. 2022. Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Berbasis Nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat. *Journal of Civic Education*
- Mann, J. dan Truswell, A, S. 2002. *Essentials Of Human Nutrition*. Oxford University Press, New York
-

- Miles, B. Matthew dan A. Michel Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3, USA : Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Norsanti, 2021. Efektifitas program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*.
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT Elex Media Computindo. Jakarta
- Nugroho, Rian. 2011. *Public Policy. Dinamika Kebijakan. Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta : PT. Elex Media Computindo. Jakarta
- Oktaviani, N. P., dkk (2022). *Siaga Stunting di Indonesia* . Yayasan kita menulis.
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 72 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kuantan Singingi
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMES)
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Gizi
- Saputri, R. A. (2019) Upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan *stunting* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*jurnal dinamika pemerintahan*), 2(2), 152-168.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Sulaiman, Affan. 1998. *Public Policy-Kebijakan Pemerintah, Bandung* : BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial. Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik. Bandung* :AIPI
- Tahir. Muh. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS